

BENANG MERAH EKONOMI KERAKYATAN ANTARA MUHAMMAD BAQIR AL-SADR DAN PRABOWO SUBIANTO

Muhammad Irawan¹, Dwi Redi Radiallah², Dwi Surya Atmaja³, Luqman Luqman⁴,
Nur Atiqah⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: muhammadirawan100799@gmail.com¹, dwiredi236@gmail.com²,
atmaja651109@gmail.com³, luqyhakim16@gmail.com⁴, nur_atiqah@iainptk.ac.id⁵

Abstrak

Sistem ekonomi global yang didominasi oleh Neoliberalisme dinilai telah gagal karena menghasilkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi. Penelitian ini menganalisis solusi alternatif dengan membandingkan konsep "Keseimbangan Sosial" (Social Balance) Muhammad Baqir al-Sadr dengan visi "Ekonomi Kerakyatan" Prabowo Subianto. Melalui studi komparatif, ditemukan tiga benang merah utama: penolakan fundamental terhadap Kapitalisme yang berpusat pada kepentingan pribadi; sentralitas Peran Negara sebagai distributor keadilan dan penjamin kesejahteraan; dan prioritas tinggi pada Keadilan Distribusi Kekayaan. Kesamaan ini tercermin dalam keselarasan antara kerangka filosofis Al-Sadr dengan implementasi praktis seperti kebijakan Hilirisasi Industri, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi, yang berfungsi sebagai mekanisme struktural untuk mencegah konsentrasi kekayaan. Secara keseluruhan, kedua kerangka ideologis ini mewakili pergeseran paradigmatis di mana negara berperan sebagai aktor utama dalam menjamin kesejahteraan publik dan kemandirian nasional.

Kata Kunci: Muhammad Baqir Al-Sadr, Prabowo Subianto, Ekonomi Kerakyatan, Keseimbangan Sosial, Peran Negara, Keadilan Distribusi.

Abstract

The global economic system, dominated by Neoliberalism, is considered to have failed due to the high levels of economic and social inequality it produces. This study analyzes alternative solutions by comparing Muhammad Baqir al-Sadr's concept of "Social Balance" with Prabowo Subianto's vision of "People's Economy" (Ekonomi Kerakyatan). Through a comparative study, three main common threads were identified: a fundamental rejection of Capitalism centered on self-interest; the centrality of the State's Role as a distributor of justice and guarantor of welfare; and a high priority on the Justice of Wealth Distribution. These similarities are reflected in the alignment between Al-Sadr's philosophical framework and practical implementations, such as Industrial Downstreaming policies, Free Nutritious Meals (MBG), and Cooperatives, which serve as structural mechanisms to prevent wealth concentration. Overall, both ideological frameworks represent a paradigmatic shift in which the state acts as the primary actor in ensuring public welfare and national independence.

Keywords: *Muhammad Baqir Al-Sadr, Prabowo Subianto, People's Economy, Social Balance, State's Role, Distributive Justice.*

PENDAHULUAN

Wacana ilmiah kontemporer semakin mengedepankan kebutuhan mendesak akan sistem ekonomi alternatif yang lebih berkeadilan. Krisis-krisis ekonomi global dan disparitas pendapatan yang melebar membuktikan kerapuhan sistem yang didominasi oleh Neoliberalisme (Firdausi & Walid, 2021). Kondisi tersebut memicu pencarian solusi struktural di berbagai belahan dunia. Menanggapi kegagalan sistem ekonomi konvensional tersebut, para pemikir Islam telah lama mengajukan konsep yang menawarkan paradigma berbeda, jauh sebelum kelemahan Neoliberalisme terekspos secara dramatis oleh krisis. Konsep ini berakar pada etika moral yang kuat dan prinsip distributif keadilan yang mendalam, berbeda dengan fokus semata-mata pada akumulasi modal dan pertumbuhan. Salah satu tokoh paling berpengaruh yang secara sistematis menyusun kerangka alternatif tersebut adalah pemikir asal Irak, Muhammad Baqir al-Sadr.

Muhammad Baqir al-Sadr (1935–1980) menyajikan salah satu kerangka solusi fundamental melalui mahakaryanya, *Iqtishaduna*. Al-Sadr memandang ilmu ekonomi konvensional khususnya kapitalisme tidak dapat sejalan dengan ajaran Islam karena dibangun di atas filosofi yang saling kontradiktif (Alkhansa et al., 2024). Al-Sadr mendefinisikan sistem ekonomi Islam sebagai jalan yang dipilih umat Islam untuk mencapai kehidupan ekonomi sesuai dengan konsep keadilan (Choiriyah, 2016). Pemikiran beliau berfokus pada etika dan doktrin Islam sebagai landasan pembentukan hukum kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat (Firdausi & Walid, 2021).

Indonesia, sebagai negara berkembang, menghadapi tantangan struktural yang serupa. Visi politik ekonomi Prabowo

Subianto berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi (8%) melalui strategi hilirisasi industri, penguatan investasi, dan reformasi fiskal (Oktaviani et al., 2025). Visi ini merupakan penegasan kembali pendekatan *state-centered* dalam pembangunan yang bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang mandiri dan berkeadilan melalui inisiatif Koperasi Merah Putih (Afgani & Wanusmawatie, 2025). Pendekatan tersebut memiliki akar ideologis kuat dari pemikiran Ekonomi ayah Prabowo, yakni Soemitro Djojohadikusumo, yang menekankan trilogi kedaulatan ekonomi: produksi, distribusi, dan konsumsi (Rizal et al., 2025).

Berbagai pemikir dan tokoh politik di sepanjang sejarah telah mengajukan model-model ekonomi yang berakar pada nilai-nilai dan filosofi khusus, seringkali sebagai respons terhadap ketidakadilan atau ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi konvensional. Pendekatan-pendekatan ini berupaya melampaui perhitungan materi semata, untuk membentuk tatanan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, yang mendasarkan dirinya pada etika sosial dan moralitas. Gagasan untuk menggabungkan kerangka kerja etis dengan mekanisme ekonomi pasar telah menjadi tema sentral dalam upaya mencari solusi atas masalah kemiskinan, ketidaksetaraan, dan krisis lingkungan hidup global. Kedua tokoh, Al-Sadr dengan Filsafat Ekonomi Islam dan Prabowo dengan Politik Ekonomi Nasional, menunjukkan orientasi serupa yaitu penciptaan sistem ekonomi yang menolak eksploitasi dan mengutamakan keseimbangan.

Berdasarkan kesenjangan akademik yang mengidentifikasi keterbatasan studi sebelumnya pada level konseptual dan urgensi praktis untuk mengatasi ketimpangan

ekonomi Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengkaji dan menganalisis secara komparatif benang merah filosofis dan operasional antara konsep *Social Balance* dan keadilan distributif dalam mahakarya *Iqtishaduna* Muhammad Baqir al-Sadr dengan visi Ekonomi Kerakyatan Prabowo Subianto, khususnya terkait peran negara dan etika ekonomi. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan (2) Menguji realitas implementasi dan efektivitas program-program kunci dalam visi Ekonomi Kerakyatan (seperti Koperasi Merah Putih, Hilirisasi, dan Jaminan Sosial) sebagai kebijakan praktis yang berpotensi merealisasikan norma ideal keadilan distributif. (3) Mengidentifikasi titik temu dan perbedaan kritis antara ketiga kerangka ideologis yakni Filsafat Ekonomi Islam Al-Sadr, Prinsip-prinsip Ekonomi Sosialis (dalam konteks distribusi kekayaan dan peran negara), dan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan era Prabowo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah Studi Pustaka Kualitatif (Library Research) dengan Pendekatan Komparatif-Filosofis Kritis-Analitis. Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder, yang bersumber dari literatur akademik, buku-buku doktrinal, dan dokumen kebijakan. Data utama yang dianalisis adalah karya-karya Baqir al-Sadr (khususnya *Iqtishaduna*) dan kajian mengenai kebijakan Ekonomi Kerakyatan era Prabowo (seperti Koperasi Merah Putih dan MBG). Pendekatan Komparatif-Filosofis berfokus pada perbandingan mendalam antara kerangka normatif al-Sadr (prinsip Keseimbangan Sosial dan Keadilan Distribusi) dengan kerangka pragmatis kebijakan Indonesia. Tujuannya adalah mencari titik temu ideologis (benang merah) sekaligus melakukan analisis kritis untuk menguji konsistensi filosofis kebijakan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Komparatif: Benang Merah Ekonomi Kerakyatan

Analisis komparatif menunjukkan tiga dimensi utama yang membentuk *benang merah* antara pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr dan visi ekonomi Prabowo Subianto. Kedua perspektif ini memiliki kesamaan filosofis yang kuat sebagai koreksi terhadap kegagalan ekonomi konvensional, terkhusus sisi kapitalisme.

2. Filsafat Ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr: *Iqtishaduna* dan Distribusi

Al-Sadr merumuskan pemikirannya sebagai kritik filosofis terhadap Materialisme Kapitalisme. Kapitalisme dan Sosialisme, menurut Al-Sadr, berangkat dari kepentingan (*interest*) perorangan pada Kapitalisme dan kolektif pada Sosialisme sedangkan Ekonomi Islam berangkat dari kesadaran etika (*ethical economy*).

Inti konsep *Iqtishaduna* adalah meletakkan hak individu dan masyarakat dalam neraca keseimbangan yang adil. Konsep ini menekankan perlunya Kepemilikan Berimbang antara individu dan masyarakat, sebuah fondasi yang membedakannya dari sistem-sistem ekonomi ekstrem lainnya (Arwiya & Malahayatie, 2025).

Al-Sadr mendedikasikan porsi substansial dalam karyanya untuk membahas Teori Distribusi (Choiriyah, 2016). Beliau meyakini masalah ekonomi muncul akibat distribusi yang tidak merata dan tidak adil, yang memungkinkan eksploitasi pihak kuat terhadap pihak lemah (Yuniarti & Mu'in, 2024). Solusi Al-Sadr terangkum dalam dua peran sentral pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan. Pertama, Jaminan Sosial (*Social Guarantee*): Pemerintah harus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu di masyarakat. Kedua, Keseimbangan Sosial (*Social Balance/Redistribution*): Upaya ini bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi melalui

intervensi negara dan instrumen syariah seperti zakat dan larangan riba (Mudawamah & Samsuri, 2024).

Al-Sadr secara fundamental menolak premis Kapitalisme yang didasarkan pada kepentingan perorangan (*selfishness*), yang terbukti menghasilkan ketidaksetaraan (Firdausi & Walid, 2021). Penolakannya berakar pada kritik moral dan filsafat bahwa sistem tersebut tidak mampu mewujudkan kebahagiaan sosial. Al-Sadr memberikan kritik tajam terhadap realisasi ekonomi konvensional terutama pada paham kapitalisme, di antaranya:

a. Kegagalan Menciptakan Keadilan Sosial

Kritik mendasar dari Sadr berfokus pada kegagalan inheren sistem ekonomi konvensional dalam mewujudkan keadilan sosial. Kapitalisme, menurut pandangannya, cenderung menghasilkan konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok elit, yang berimplikasi pada marginalisasi signifikan terhadap individu dan kelompok mayoritas lainnya. Disparitas ini bersumber dari mekanisme pasar yang terbukti tidak efektif dalam memastikan distribusi kekayaan yang proporsional, sehingga memperdalam jurang kesenjangan sosio-ekonomi. Sadr menegaskan bahwa setiap kerangka sistem ekonomi wajib menjadikan keadilan sosial sebagai imperatif utama, sebuah dimensi krusial yang seringkali terabaikan oleh sistem yang berlaku saat ini (Choiriyah, 2016).

b. Eksploitasi dan Ketidakadilan Ekonomi

Sadr juga mengajukan kritik terhadap praktik-praktik yang cenderung bersifat eksploitatif dalam kerangka sistem kapitalis. Demi mencapai maksimalisasi laba, korporasi secara umum cenderung mengesampingkan pemenuhan hak-hak pekerja dan menjaga kelestarian lingkungan. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah terciptanya kondisi kerja yang tidak berkeadilan serta dampak negatif yang

meluas terhadap kesejahteraan masyarakat. Sadr berpendapat bahwa orientasi utama aktivitas ekonomi haruslah terletak pada kesejahteraan kolektif (kesejahteraan manusia), bukan semata-mata akumulasi keuntungan material. Aspek fundamental ini kerap kali terabaikan dalam implementasi sistem ekonomi kontemporer.

c. Keterasingan Moral dalam Aktivitas Ekonomi

Sistem ekonomi konvensional, menurut perspektif Sadr, kerap mengabaikan dimensi moralitas dan etika dalam menjalankan aktivitasnya. Beliau berargumen bahwa domain ekonomi merupakan kesatuan inheren dengan nilai-nilai moral, sehingga setiap tindakan ekonomi mesti diimplementasikan dengan kesadaran penuh terhadap tanggung jawab sosial. Dalam kerangka kapitalisme, motivasi utama acapkali hanya tereduksi pada perolehan profit finansial semata (Santika & Surur, 2025). Orientasi ini mengesampingkan evaluasi komprehensif terhadap dampak sosial maupun ekologis yang timbul dari implementasi kebijakan dan praktik ekonomi tersebut.

d. Ketidakstabilan Ekonomi

Sadr juga menggarisbawahi kecenderungan sistem ekonomi konvensional dalam memicu ketidakstabilan. Fenomena fluktuasi pasar, krisis ekonomi, dan resesi seringkali terwujud sebagai konsekuensi dari praktik spekulatif serta perilaku yang bertentangan dengan etika. Ketidakpastian struktural tersebut secara signifikan merugikan populasi, terutama segmen masyarakat yang berada dalam kondisi paling rentan. Oleh karena itu, Sadr berpendapat bahwa sistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan merupakan prasyarat esensial untuk menjamin tercapainya kesejahteraan kolektif.

e. Ekonomi Islam

Sadr menawarkan sistem ekonomi Islam sebagai solusi alternatif yang diklaim lebih adil dan berkelanjutan. Beliau menegaskan bahwa kerangka ekonomi Islam berakar pada prinsip-prinsip keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial. Dalam implementasi sistem ini, distribusi kekayaan ditata secara terstruktur guna menjamin setiap anggota masyarakat memperoleh haknya secara proporsional. Lebih lanjut, aktivitas ekonomi dieksekusi dengan mempertimbangkan secara holistik pencapaian kesejahteraan kolektif (Azwar & Dalimunthe, 2024).

Perspektif Sadr juga sejajar dengan kritik pemikiran ekonomi Sosialisme terhadap Kapitalisme, yang menyoroti eksploitasi tenaga kerja dan ketimpangan ekonomi. Prinsip dasar sosialisme berfokus pada redistribusi kekayaan melalui skema pajak progresif, penetapan layanan sosial (seperti pendidikan dan kesehatan) sebagai hak universal, serta kepemilikan kolektif atas industri dan sumber daya esensial. Pemerintah memegang peran sentral dalam mengelola perekonomian dan menjamin pemerataan kekayaan masyarakat. Tujuan utama sosialisme adalah mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan adil dengan memprioritaskan kebutuhan mayoritas (Juliyanto et al., 2024). Hal ini sangat kontras dengan kapitalisme yang menghasilkan konsentrasi kekayaan pada korporasi atau individu tertentu. Implementasi kebijakan redistributif dan program kesejahteraan secara efektif berfungsi mengurangi kesenjangan pendapatan dan membentuk jaring pengaman social (Adam et al., 2024).

3. Kedaulatan Ekonomi dalam Visi Prabowo Subianto: Pendekatan *State-Centered*

Visi Ekonomi Kerakyatan yang diusung Prabowo Subianto memiliki landasan ideologis kuat pada pemikiran Soemitro Djojohadikusumo. Soemitro

menekankan perlunya Kedaulatan Ekonomi Nasional, terutama kedaulatan atas produksi, distribusi, dan konsumsi, sebagai upaya mencapai kemandirian dan keadilan. Konsepsi ideologi ekonomi Soemitro termanifestasi dalam serangkaian prinsip kebijakan publik fundamental yang mempertahankan relevansinya hingga saat ini. Prinsip-prinsip tersebut mencakup intervensi negara yang terarah pada sektor-sektor krusial, meliputi energi, transportasi, dan keuangan. Penekanan diletakkan pada penguatan struktur industri substitusi impor sebagai upaya strategis untuk mereduksi ketergantungan ekonomi terhadap komoditas asing. Selain itu, menjadi fokus utama pengembangan industri dasar nasional, seperti industri baja, pupuk, dan kimia. Kebijakan ini juga melibatkan proteksi sistematis bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui implementasi instrumen fiskal dan regulasi yang bersifat afirmatif (Rizal et al., 2025).

Visi Ekonomi Kerakyatan Prabowo Subianto, meskipun tidak menggunakan terminologi syariah, secara praktis merupakan antitesis terhadap ekonomi liberal yang berfokus pada pasar global (Rizal et al., 2025). Kebijakan ekonomi strategis Presiden Prabowo Subianto berpusat pada dua pilar utama yakni Kesejahteraan Rakyat dan Kemandirian Nasional. Implementasi visi ekonomi kerakyatan tersebut termanifestasi dalam serangkaian intervensi kebijakan strategis. Intervensi ini dirancang untuk mengatasi akar permasalahan ketidakadilan sosial-ekonomi dan memperkuat kedaulatan negara di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global (Nirzawan & Wakhid, 2025). Tiga klaster utama program tersebut meliputi penguatan jaring pengaman sosial yang masif, revitalisasi kelembagaan ekonomi berbasis kerakyatan, serta penciptaan nilai tambah (*value creation*) melalui hilirisasi sumber daya alam.

a. Makan Bergizi Gratis

Salah satu program jaminan sosial pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi stimulus ekonomi yang masif karena menciptakan pasar baru bagi produk pangan lokal (pertanian dan UMKM) sekaligus meningkatkan kualitas SDM jangka panjang. Program unggulan ini bertujuan memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Program ini memiliki potensi besar untuk mengurangi masalah gizi seperti stunting, wasting, dan anemia di antara siswa. Nutrisi yang sehat sangat penting untuk perkembangan kognitif dan kesehatan jangka Panjang (Purnomo et al., 2025). Akibatnya, intervensi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan peserta didik akan makanan sehari-hari, tetapi juga memaksimalkan potensi akademik dan produktivitas siswa.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang sebagai kebijakan intervensi sosial yang memiliki dampak ekonomi berganda. Program ini berfungsi sebagai stimulus permintaan agregat domestik melalui peningkatan konsumsi. Pada saat yang sama, MBG berorientasi pada pembangunan modal manusia jangka panjang melalui perbaikan status gizi. Implementasinya juga mengintegrasikan sektor pangan lokal, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput (Kiftiyah et al., 2025).

Program MBG juga menjadi katalisator utama penciptaan lapangan kerja di seluruh rantai pasok ekonomi kerakyatan, mulai dari hulu di mana terjadi peningkatan permintaan masif untuk bahan baku seperti beras, telur, dan daging, yang secara langsung menciptakan lapangan kerja bagi jutaan petani, peternak, dan nelayan lokal. Selanjutnya, di sektor pengolahan dan logistik, dibutuhkan tenaga kerja baru di pabrik pengolahan makanan, gudang penyimpanan, dan jasa transportasi untuk mendistribusikan bahan pangan secara nasional. Puncak penciptaan lapangan kerja

terjadi di sektor hilir, yaitu di tingkat desa dan sekolah, di mana UMKM dan Koperasi lokal akan diberdayakan sebagai penyedia layanan katering dan juru masak, sehingga program ini tidak hanya mengatasi masalah gizi, tetapi juga menjadi program padat karya yang menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat di akar rumput.

b. Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih diinisiasi berdasarkan gagasan sentral yang berfokus pada penguatan ekonomi komunitas di tingkat desa dan kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Struktur koperasi ini didesain untuk mengerek tingkat kesejahteraan masyarakat melalui implementasi asas kekeluargaan, gotong royong, dan partisipasi kolektif. Secara spesifik, entitas ini memiliki tujuan krusial untuk mengukuhkan kemandirian ekonomi pada spektrum lokal. Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan inisiasi pembentukan koperasi ini pada agenda Rapat Terbatas di Istana Negara, tepatnya tanggal 3 Maret 2025. Salah satu sasaran fundamental dari pembentukan ini adalah memperkokoh ketahanan pangan nasional melalui mekanisme pemberdayaan ekonomi yang berbasis lokal.

Revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara struktural mengukuhkan fondasi ekonomi kerakyatan dan memosisikannya sebagai pilar utama gotong royong di aras bawah (Saputri et al., 2025). Upaya ini merupakan komponen yang bersifat komplementer terhadap langkah-langkah strategis untuk merealisasikan Swasembada Pangan, Energi, dan Air, yang berfungsi sebagai jaminan kedaulatan ekonomi nasional dari potensi tekanan global. Finalitas dari keseluruhan strategi ini adalah mengintegrasikan Indonesia sebagai anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), guna

mencapai standar tata kelola dan daya saing ekonomi yang diakui secara global.

Kebijakan Koperasi Merah Putih merupakan implementasi konkret dari pendekatan *state-centered* untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Negara bertindak sebagai aktor utama yang mengintervensi langsung guna menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang mandiri dan berkeadilan (Afgani & Wanusmawatie, 2025). Inisiatif ini secara eksplisit dirancang untuk memberdayakan semua lapisan masyarakat.

c. Hilirisasi Industri

Strategi politik ekonomi Indonesia era Prabowo difokuskan pada upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi, dengan Hilirisasi Industri sebagai motor utama (Oktaviani et al., 2025). Pemerintah memperkuat fundamental ekonomi melalui kebijakan Hilirisasi Industri yang bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas mineral dan SDA lainnya di dalam negeri, diiringi dengan kebijakan moneter yang mewajibkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA disimpan di dalam negeri guna menstabilkan nilai tukar Rupiah. Kebijakan Hilirisasi dan penguatan industri nasional mencerminkan upaya sistematis untuk mengurangi ketergantungan pada mekanisme pasar bebas murni dan praktik ekonomi yang berat sebelah (Sinaga, 2022).

Kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA) pada masa pemerintahan Prabowo dirancang guna mewujudkan ketahanan dan keberlanjutan ekonomi nasional. Strategi ini berfokus pada pengembangan sektor industri yang lebih terintegrasi dan bernilai tambah tinggi. Implementasi hilirisasi bertujuan spesifik untuk memitigasi ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah sekaligus memperkuat kapabilitas kompetitif Indonesia di kancah perdagangan internasional (Akhmadi, 2024). Program hilirisasi ini diproyeksikan memberikan dampak

multiplikatif substansial demi kemakmuran masyarakat Indonesia.

Upaya memastikan keberlanjutan inisiatif hilirisasi menuntut adopsi langkah-langkah strategis terstruktur. Hal ini mencakup peningkatan intensitas investasi, penciptaan lapangan kerja baru, serta optimalisasi agregasi nilai tambah domestik. Secara substantif, pembiayaan dan investasi menempati posisi sentral sebagai pendorong utama. Pemerintah perlu mengambil kebijakan insentif untuk mendorong partisipasi aktif sektor perbankan dan institusi keuangan domestik dalam proyek-proyek hilirisasi. Insentif dan penyederhanaan prosedur administratif dapat memfasilitasi peran lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, optimalisasi sumber pendanaan domestik, baik melalui alokasi investasi pemerintah maupun instrumen pembiayaan berbasis pasar, dapat menjadi solusi strategis untuk mengurangi risiko ketergantungan pada utang eksternal. Model pembiayaan alternatif seperti Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) atau *Public-Private Partnerships (PPP)*, menjadi sangat relevan sebagai penopang proyek hilirisasi berskala besar (Wuryandani, 2025).

Presiden Prabowo menegaskan urgensi kesinambungan kebijakan hilirisasi guna memastikan optimalisasi pemanfaatan kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia. Optimalisasi tersebut ditujukan untuk menghasilkan peningkatan signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Program hilirisasi nikel, misalnya, telah menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini terefleksikan melalui total realisasi investasi terkini yang per tahun 2024 mencapai sekitar Rp1.714,2 triliun, menandakan pertumbuhan sebesar 20,8% secara *year-on-year*.

Amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit menggarisbawahi keselarasan kebijakan hilirisasi dengan prinsip ekonomi kerakyatan.

Konsep perekonomian ini secara fundamental diarahkan untuk mencapai kemakmuran rakyat secara maksimal. Hilirisasi komoditas tambang terbukti menciptakan nilai tambah, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan signifikan penerimaan negara dan akselerasi laju pertumbuhan ekonomi (Wau et al., 2024).

Dalam perspektif formulasi kebijakan publik, kebijakan hilirisasi merepresentasikan hasil dari proses pendalaman dan riset yang komprehensif oleh pemerintah. Kebijakan ini merupakan respons strategis terhadap dinamika perekonomian global. Indonesia dituntut memiliki strategi dan taktik perekonomian yang terdefiniskan secara jelas. Tujuannya adalah memastikan ekstraksi SDA menghasilkan dampak optimal terhadap perekonomian, sekaligus memosisikan Indonesia sebagai subjek dan pemain kunci dalam arena geoekonomi global.

Keterkaitan sederhana program Hilirisasi dengan program MBG dan Koperasi Merah Putih adalah Hilirisasi menciptakan uang, yang kemudian dipakai untuk mendanai MBG, dan Koperasi Merah Putih adalah institusi yang memastikan uang tersebut *turun* secara efisien dan menciptakan lapangan kerja di tingkat desa, sehingga mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam bingkai Ekonomi Kerakyatan. Secara esensial, integrasi ketiga klaster kebijakan tersebut merepresentasikan pergeseran paradigmatis dari fundamentalisme pasar menuju sistem yang lebih terpusat pada peran negara. Kerangka kebijakan yang terpadu ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mendistribusikan hasil pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah memastikan kekayaan nasional dimanfaatkan secara optimal untuk menjamin kesejahteraan publik dan membangun kemandirian jangka panjang, sekaligus merealisasikan amanat konstitusional.

Pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr memiliki relevansi mendalam terhadap visi ekonomi kerakyatan Prabowo Subianto, terutama karena keduanya berakar pada penolakan filosofis terhadap kegagalan kapitalisme dan liberalisme ekonomi. Al-Sadr secara fundamental mengkritik Kapitalisme yang didasarkan pada kepentingan perorangan (*selfishness*), terbukti menghasilkan ketidaksetaraan dan kegagalan menciptakan kebahagiaan sosial. Kritik ini mencakup kegagalan Kapitalisme menciptakan keadilan sosial, praktik eksploitasi, dan ketidakstabilan ekonomi akibat spekulasi. Sebagai alternatif, Al-Sadr mengusulkan sistem yang berlandaskan pada prinsip keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial. Visi Prabowo secara praktis merupakan antitesis terhadap ekonomi liberal, berpusat pada Kesejahteraan Rakyat dan Kemandirian Nasional.

Relevansi ini termanifestasi dalam tiga kebijakan strategis yang saling terkait: pertama, Makan Bergizi Gratis (MBG), program jaminan sosial masif yang menciptakan pasar baru bagi produk pangan lokal (pertanian dan UMKM) sekaligus meningkatkan kualitas SDM jangka panjang. MBG secara langsung mengatasi masalah gizi dan menjadi program padat karya yang menggerakkan roda ekonomi, memberdayakan UMKM dan Koperasi di tingkat desa, sehingga mewujudkan pemerataan dan keadilan. Kedua, Revitalisasi Koperasi Merah Putih diperkuat secara struktural sebagai pilar gotong royong, dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip kekeluargaan dan partisipasi bersama demi menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat lokal. Ketiga, Hilirisasi Industri bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas mineral di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada mekanisme pasar bebas, didukung kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) disimpan di dalam negeri guna menstabilkan nilai tukar Rupiah. Hilirisasi menciptakan uang, yang

kemudian dipakai untuk mendanai MBG, dan Koperasi Merah Putih adalah institusi yang memastikan uang tersebut *turun* secara efisien dan menciptakan lapangan kerja di tingkat desa, sehingga mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam bingkai Ekonomi Kerakyatan.

4. Peran Strategis Negara dan Keadilan Distribusi Kekayaan

a. Peran Strategis Negara

Kedua model ekonomi menempatkan negara pada posisi strategis sebagai agen perubahan dan distributor keadilan. Al-Sadr secara tegas menyatakan bahwa implementasi gagasan ekonomi Islam tidak mungkin tanpa adanya peran Pemerintah. Negara memiliki mandat etik-religius untuk mewujudkan *Jaminan Sosial* bagi rakyatnya (Choiriyah, 2016).

Konsepsi ini terefleksi dalam pendekatan *State-Centered* pada visi Prabowo, yang menjadikan intervensi negara sebagai kunci dalam pembangunan. Melalui kebijakan Hilirisasi, negara mengarahkan sumber daya dan produksi; melalui Koperasi Merah Putih, negara mengarahkan distribusi dan pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput (Afgani & Wanusmawatie, 2025). Negara berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional, yang sejalan dengan cita-cita Al-Sadr mengenai peran negara sebagai penjamin keseimbangan sosial. Cara penerapan ini menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah lebih unggul dalam memperbaiki kegagalan pasar. Keaktifan Pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan terwujudnya keadilan ekonomi (*al-'adalah*) melalui aturan yang memihak kepentingan bersama dan mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan (Meiriza et al., 2024).

b. Keadilan Distribusi Kekayaan

Fokus utama Al-Sadr adalah mengatasi masalah distribusi yang tidak adil sebagai akar persoalan ekonomi (Yuniarti & Mu'in,

2024). Konsep Keseimbangan Sosial (*Social Balance*) menekankan perlunya redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan (Arwiya & Malahayatie, 2025).

Aspirasi keadilan distributif ini selaras dengan fokus Ekonomi Kerakyatan Prabowo pada penguatan ekonomi desa. Inisiatif Koperasi Merah Putih didesain untuk menciptakan ekonomi yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat lokal, secara efektif menjadi mekanisme Redistribusi kekayaan dan peluang dari pusat ke daerah (Afgani & Wanusmawatie, 2025). Upaya penguatan Koperasi dan ekonomi lokal merupakan perwujudan praktis dari upaya sistematis untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan sumber daya manusia (Oktaviani et al., 2025). Implementasi program tersebut merefleksikan prinsip-prinsip *al-'adl wa al-ihsan* (keadilan dan kebaikan) dalam konteks ekonomi modern. Mekanisme Koperasi berperan sebagai institusi kolektif yang mengeliminasi dominasi kapital dan memastikan perputaran modal terjadi di basis masyarakat. Dengan demikian, kedua pandangan ini bertemu pada titik penting, yaitu penekanan pada keberpihakan struktural untuk mencapai pemerataan ekonomi dan mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr dan visi Ekonomi Kerakyatan Prabowo Subianto menemukan benang merah filosofis dan operasional yang substansial, berfungsi sebagai antitesis terhadap fundamentalisme Kapitalisme dan Liberalisme Ekonomi yang terbukti menghasilkan ketidaksetaraan sosio-ekonomi global. Kesamaan ideologis ini didasarkan pada penolakan filosofis terhadap premis Kapitalisme yang berakar pada kepentingan perorangan (*selfishness*), yang dianggap gagal menciptakan keadilan sosial, memicu

eksploitasi, dan ketidakstabilan ekonomi. Kedua model secara tegas menempatkan peran sentral negara (*State-Centered*) sebagai agen perubahan dan distributor kekayaan, berbeda dengan *laissez-faire* pasar bebas. Al-Sadr mengamankan peran negara melalui konsep *Jaminan Sosial* dan *Keseimbangan Sosial* untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat dan mengatasi kesenjangan. Konsepsi normatif tersebut diterjemahkan secara pragmatis dalam kebijakan *Ekonomi Kerakyatan* era Prabowo melalui tiga klaster utama: Hilirisasi Industri (sebagai pencipta nilai tambah domestik), Makan Bergizi Gratis (MBG) (sebagai jaminan sosial dan stimulus permintaan agregat), dan Koperasi Merah Putih (sebagai institusi redistribusi dan pencipta lapangan kerja di tingkat desa). Dengan demikian, integrasi kebijakan yang terpadu ini merepresentasikan perwujudan praktis dari upaya sistematis untuk merealisasikan norma ideal keadilan distributif, memastikan hasil pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara efisien, serta mengukuhkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional sesuai amanat konstitusional.

Saran

1. Optimalisasi Peran Koperasi: Pemerintah perlu memperkuat legalitas dan akses permodalan Koperasi Merah Putih agar mampu menjadi instrumen struktural dalam mencegah konsentrasi kekayaan dan mewujudkan keseimbangan sosial di tingkat desa.
2. Sinkronisasi Hulu-Hilir: Diperlukan integrasi kebijakan yang ketat antara dana hasil Hilirisasi Industri dengan pembiayaan Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui rantai pasok lokal guna menjamin kemandirian pangan dan kedaulatan ekonomi.
3. Indikator Keberhasilan Berbasis Keadilan: Pengukuran keberhasilan ekonomi sebaiknya tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan PDB,

tetapi juga pada efektivitas distribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan sosial sesuai prinsip etika ekonomi.

4. Penelitian Lanjutan: Peneliti selanjutnya disarankan melakukan studi empiris untuk menguji efektivitas program-program tersebut dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, M. N. A. S., Hamin, D. I., & Hasim. (2024). Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme, Kapitalisme, dan Ekonomi Syariah: Sebuah Analisis Kritis terhadap Prinsip, Implementasi, dan Dampak Sosial. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 1011–1024. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB>

Afgani, R., & Wanusmawatie, I. (2025). Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Ekonomi Politik Pembangunan: Pendekatan State-Centered dan Teori Ketergantungan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 22375–22383.

Akhmadi, F. (2024). Analisis Dampak Hilirisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *HATTA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2(April), 25–31. <https://doi.org/https://jurnal.stkip-majenang.ac.id/index.php/hatta>

Alkhansa, N. A., Barasa, N. A., Pramanda, A. D., Heriyadi, R., & Bintang, F. A. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Kontempore (Muhammad Baqir Al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra). *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.699>

- Arwiya, L., & Malahayatie. (2025). Distribusi Kekayaan Dalam Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr: Solusi Untuk Keadilan Sosial di Era Kontemporer. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 11–21.
- Azwar, R., & Dalimunthe, S. (2024). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir Sadr : Studi Literatur Sistematis terhadap Konsep dan Implementasinya. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 24(2), 220–227. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.21805>
- Choiriyah. (2016). Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr. *Islamic Banking*, 2(1), 49–58.
- Firdausi, & Walid, K. Al. (2021). Analisis Kritis Filsafat Muhammad Baqir Al-Sadr Terhadap Sistem Ekonomi Neoliberal. *Kanz Philosophia*, 7(2), 135–158.
- Juliyanto, M. S., Syafi, R. A. A., Fatkhurrozi, M., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. A. (2024). Sejarah Pemikiran Ekonomi Neo-Klasik, Kapitalisme, Sosialisme dan Keynesian. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 377–385. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.610>
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Makan Bergizi Gratis (MBG) Program in the Perspective of Social Justice and Socio – Political Dynamics. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>
- Meiriza, M. S., Ujung, S., Pasaribu, N., Siboro, H., & Tarigan, D. R. (2024). Analisis Ekonomi Pancasila Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Ekonomi. *Journal on Education*, 07(01), 7603–7615. <https://doi.org/http://jonedu.org/index.php/joe>
- Mudawamah, D., & Samsuri, A. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Prespektif Muhammad Baqir Ash-Sadr. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 298–305. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jrme.v1i2.1509>.
- Nirzawan, F. D., & Wakhid, A. A. (2025). A New Era of President Prabowo's Leadership and Governance: Indonesia's Food Security. *Jurnal Studi Keislaman*, 25(1), 185–218.
- Oktaviani, R., Pratama, D. H., & Malik, A. (2025). Politik Ekonomi Indonesia Era Prabowo: Tinjauan Literasi Atas Strategi Pencapaian Pertumbuhan 8% Nasional. *Musyteri Neraca Manajemen, Ekonomi*, 24(12). <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Purnomo, A., Putikadyanto, A., & Nur, A. (2025). Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 768–780. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19191>
- Rizal, A., Haryono, Y., Sunaryo, Y., & Setiadi, D. (2025). Pemikiran Ekonomi Soemitro Djojohadikusumo : Fondasi Ideologis Dan Kebijakan Publik Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Kontemporer. *Jurnal USK Riwayat*, 5665–5674.
- Santika, W. H., & Surur, M. (2025). Merekonstruksi Ekonomi Pembangunan dalam Perspektif Islam : Menjawab Kegagalan Kapitalisme terhadap Kesejahteraan Sejati. *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(1), 112–121.
- Saputri, A. R., Subandriyanto, & Hardiyanto, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan

- Desa dan Tata Kelola Pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95–106.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.83>
- Sinaga, R. Y. (2022). An Interpretive and Critical Paradigm Study of the “Gerakan Ekonomi Benteng” in Indonesia. *The Scientia Journal of Economics Issues*, 1(1), 1–5.
- Wau, F. T., Andriaskiton, M., Wau, M., & Fau, J. F. (2024). Analisis Strategis Kebijakan Hilirisasi Mineral: Implikasi Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(3), 1215–1224.
<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.481>
- Wuryandani, D. (2025). Keberlanjutan Program Hilirisasi Sumber Daya Alam di Indonesia. *Info Singkat Komisi XII, XVII*(4), 1–5.
- Yuniarti, D., & Mu’in, R. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Muhammad Baqir Ash-Sadr. *Jurnal Ilmiah Falsafah*, 10(1), 27–35.
<https://doi.org/10.37567/jif.v10i1.2153>